
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) di Indonesia

Darmesta Hadiano¹; Alek Murtin²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Political Competition;
Local Government Size;
Debt Financing Ratios;
Income per Capita;
Regional Wealth; Audit
Opinion; Disclosure of
*Internet Financial
Reporting* (IFR)

Jenis Artikel:

Penelitian Empiris

Korespondensi:

darmesta.hadiano@gmail.com

Proses Artikel:

Diterima 27 Agustus 2020
Reviu 28 September 2020
Reviu 24 Desember 2020
Diterbitkan 31 Desember 2020

Sitasi:

Hadiano, D., & Murtin, A.
(2020). Analisis faktor-
faktor yang mempengaruhi
pengungkapan *Internet
Financial Reporting* (IFR)
di Indonesia. *Reviu
Akuntansi dan Bisnis
Indonesia*, 4(2), 33-45.

Link Artikel:

[10.18196/rabin.v4i2.10719](https://doi.org/10.18196/rabin.v4i2.10719)

ABSTRAK

Latar Belakang:

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi maka akses yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi juga seharusnya semakin mudah. Disisilain Pentingnya transparansi penyediaan informasi pada pelayanan sektor publik di Indonesia, hal ini didukung oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka diperlukan *good governance* dengan cara membangun situs webnya masing-masing sehingga dapat memperkenalkan potensi sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Tujuan:

Penelitian ini menguji pengaruh persaingan politik, ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan hutang, pendapatan per kapita, kekayaan daerah dan opini audit terhadap pengungkapan IFR.

Metode Penelitian:

Data yang digunakan untuk analisis adalah data keuangan daerah sekunder yang ditabulasikan dari beberapa sumber digital dengan jumlah sampel 66 daerah dari jumlah penduduk seluruh pemerintah daerah. Sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda dan dilengkapi dengan uji asumsi klasik.

Hasil Penelitian:

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio persaingan politik dan kekayaan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR. Sedangkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan IFR. Selanjutnya, debt financing berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan IFR. Terakhir, pendapatan per kapita dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan IFR.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini masih banyak kekurangan dan perlu dikembangkan untuk memberikan khasanah keilmuan yang lebih sempurna dan komprehensif. Ada beberapa factor yang diduga dapat mengakomodir lebih dalam memngaruhi penelitian ini lebih baik.

Keaslian/Novetly Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dan hasil fenomena informasi yang ada pada pemerintah daerah.

PENDAHULUAN

Di era modern sekarang ini, suatu institusi atau lembaga publik negara membutuhkan adanya sistem pemerintahan yang kuat dan juga bersih atau yang dikenal dengan *type of a clean or good governance* (Putera, 2016). Adanya tuntutan seperti itu sehingga transparansi laporan keuangan kini semakin diperhatikan oleh negara berkembang, terutama Indonesia. Maksud tujuannya yaitu supaya masyarakat bisa melihat apa yang terjadi dan akan dikerjakan lembaga pemerintahan mengenai penggunaan anggaran yang ada dalam replika terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya transparansi penyediaan informasi pada pelayanan sektor publik di Indonesia, hal ini didukung oleh keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara jelas undang-undang ini menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik secara transparan dengan tanggung jawab dan orientasi terhadap pelayanan masyarakat sehingga mudah untuk diakses cepat, efisien dan juga mudah dipahami masyarakat (Nosihana & Yaya, 2016). Transparansi merupakan salah satu ciri pengelolaan keuangan dan juga merupakan elemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi maka akses yang dapat digunakan untuk mengetahui informasi juga seharusnya semakin mudah. Seperti halnya internet, teknologi ini mempermudah setiap penggunaannya dalam pertukaran informasi dengan cepat dan mudah. Pada perkembangan teknologi digital khususnya di bidang informasi internet sehingga banyak pengguna internet di kalangan masyarakat menjadi cermin bahwa internet merupakan suatu kebutuhan yang penting. Terjadinya proses digitalisasi pada seluruh organisasi karena pembiayaan yang relatif lebih murah saat menggunakan teknologi dalam penyampaian sebuah informasi serta kekuatan dari teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah dan meningkatkan tingkat aktivitas dari entitas ekonomi, yang awalnya dilakukan secara manual dan konvensional menurut Puspita dan Martani dalam Hudoyo dan Mahmud (2014).

Pemerintah daerah juga menggunakan suatu media untuk membagikan informasi mengenai kegiatan pemerintah daerah yaitu menggunakan *website* pemerintah daerah yang resmi. Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah dari pusat hingga daerah menjadi *good governance* dengan cara membangun situs webnya masing-masing sehingga dapat memperkenalkan potensi sekaligus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian intruksi tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Telekomunikasi dan Informatika dengan dikeluarkannya Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah dan Blue Print implementasi aplikasi *e-government* Pemda di Indonesia (Mutih, 2017).

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan IFR atau *Internet Financial Reporting* pada sektor publik yaitu pemerintah daerah melalui *e-government* telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Seperti Rahman, dkk. (2013) menemukan bahwa variabel *political competition, leverage, local government wealth* berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kota (kabupaten) di Indonesia. Susbiyani, Subroto, dan Purnomosidhi, (2014) menemukan bahwa variabel *size of local government, type of local government, wealth* berpengaruh signifikan mandatory disclosure. Susiyah, Afifudin, dan Mawardi (2018) mengatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah (Size) berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan IRF. Dimana semakin besar aset Pemerintah Daerah, namun tidak diiringi dengan kemampuan yang memadai mengenai standar yang berlaku dan pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatannya, maka akan menyebabkan Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengungkapkannya di website. Kekayaan Pemerintah Daerah (Wealth) berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan IRF di Website.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktek *Internet Financial Reporting* Pemda, seperti Nosihana dan Yaya (2016), Hudoyo dan Mahmud (2014), Junaedi (2015), Mutiha (2017), Diptyana dan Rokhmaniab (2018), Rahman dkk (2013), Susiyah dkk (2018), Alhajjriana, Nor, dan Wijaya (2017) dengan kesimpulan penelitian yang tidak konsisten antar penelitian yang ada.

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan untuk menganalisis aksesibilitas laporan keuangan di internet atau IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* dengan variabel-variabel yang diasumsikan memiliki hubungan positif, yaitu *size*, *debt*, *income per capita*, dan *debt level* pemerintah daerah serta implikasinya penerapan IFR dengan mengkaitkannya dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9 (informasi mengenai laporan keuangan saja). Hasilnya menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *size*, *income per capita*, dan *debt level* dengan aksesibilitas laporan keuangan. (Verawaty, 2015).

Penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi yang mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Verawaty (2015) dengan judul *Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-government Pemerintah Daerah Di Indonesia*, menggunakan variabel *size*, *income per capital*, dan *debt level*. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel kekayaan daerah dan opini audit.

Variabel kekayaan daerah (*wealth*) digunakan karena semakin tinggi kekayaan daerah maka semakin besar pendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya melalui internet. (Junaedi, 2015). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman, dkk. (2013) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah (*wealth*) memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Tingkat kekayaan daerah yang tinggi juga bisa dianggap sebagai wujud keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya, hal ini merupakan sinyal positif bagi daerah baik secara ekonomi maupun politik. Peneliti juga menambahkan variabel opini audit didasari atas pelaporan keuangan pemda yang baik akan mendapat suatu penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangan tersebut. Sehingga penyajian laporan keuangan di internet akan dipengaruhi oleh opini audit. Hal ini sesuai dengan pernyataan Junaedi (2015) dalam penilitiannya bahwa opini audit akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan di internet.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengambil judul “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) di Indonesia (studi empiris pada pemda kota/kabupaten seluruh Indonesia)”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Verawaty (2015) dengan variabel *size*, *income per capital*, dan *debt level*. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan tiga variabel independen yaitu variabel kompetisi politik, kekayaan daerah, opini audit. Variabel kompetisi politik dan kekayaan daerah diambil dari penelitian yang dilakukan Rahman dkk (2013), sedangkan variabel opini audit diambil dari penelitian yang dilakukan Junaedi (2015). Penambahan variabel pada penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah kota/kabupaten di Indonesia untuk menciptakan *good governance* dan *clean governance* yang terkait dengan pelaporan *Internet Financial Reporting*, agar tercapai transparansi dan akuntabilitas publik.

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* meneliti hubungan dan perilaku yang sering diabaikan dalam teori ekonomi organisasi, menekankan perilaku kontraktual kolektif, pro- organisasi, di mana nilai yang lebih tinggi ditempatkan pada konvergensi tujuan dari pada kepentingan agen. Menurut Davis, Donaldson dan Schoorman 1997 dalam Van Slyke 2006 teori *stewardship* didefinisikan dimana situasi ketika manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih merupakan pelayan *steward* yang motifnya selaras dengan tujuan *principal* mereka.

Dalam kasus hubungan kontrak layanan sosial pemerintah-nirlaba, teori *stewardship* adalah model yang tepat karena nirlaba berdasarkan bentuk organisasi mereka, misi khusus yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan stabilitas klien, struktur pemerintahan, sifat saling tergantung

sumber daya dari hubungan pendanaan mereka dengan pemerintah, serta sifat kontrak layanan sosial yang tidak lengkap dapat berkontribusi pada kesesuaian mereka dengan tujuan pemerintah (Van Slyke, 2006).

Teori *Signalling*

Sektor publik dalam konteks teori *signalling*, dalam artian pemerintah akan berusaha memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat menurut Evans dan Patton (1987) dalam Verawaty (2015). Pemerintah dapat mempublikasikan laporan keuangan untuk memberikan sarana sinyal baik kepada masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan dukungan terus-menerus dari masyarakat sehingga dapat menopang perjalanan pemerintahan dengan baik. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat akan pengungkapan laporan kinerja menyebabkan pemerintah untuk melaporkan kinerjanya termasuk pelaporan keuangan atau yang dikenal dengan *Internet Financial Reporting*.

Verawaty (2015) mengatakan bahwa kedua teori diatas menjadi dasar untuk mengurangi atau meminimalkan asimetri informasi sehingga pengungkapan (*disclosure*) pada akuntansi sektor publik dapat berguna. Pengungkapan *Internet Financial Reporting* (IFR) dapat menjadi keunggulan dari fasilitas e-government karena dengan cara pengungkapan IFR maka informasi yang disistribusikan akan lebih cepat dan bisa langsung dieksploitasi dalam hal keterbukaan laporan keuangan.

Kompetisi Politik

Nosihana dan Yaya (2016) mengatakan bahwa kegiatan administrasi publik di tingkat lokal banyak diatur oleh politisi yang sedang berperan dan memiliki posisi strategis dalam pengontrolan kebijakan keuangan daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 21, bahwa anggota legislatif memiliki hak untuk meminta pemerintah daerah menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK. Semakin tingginya tingkat kompetisi politik pada pemerintahan maka para pejabat yang sedang menduduki jabatan akan berusaha memperlihatkan hasil kinerjanya yang baik, dengan cara melakukan pengungkapan keuangan pada e-government. Pengungkapan laporan pada e-government dipilih karena merupakan media yang mudah dan murah.

Terjadinya kompetisi politik dapat memunculkan tindakan pengawasan dari pihak lain seperti masyarakat yang dapat melakukan pemantauan para pejabat untuk memastikan janji-janji yang telah dibuat pada pemilu sebelumnya. Dengan adanya pelaporan keuangan yang dapat diakses dengan mudah sehingga para pejabat dapat memperlihatkan hasil dari janjinya. Pengawasan masyarakat ini akan membuat pejabat politik untuk mendesak melakukan pengungkapan keuangan sehingga para pejabat akan mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memperbesar terpilihnya kembali pada pemilihan periode selanjutnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016), Rahman dkk. (2013) bahwa adanya kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting*. Akan tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Alhajriana et al., (2017), Diptyana dan Rokhmaniab (2018) yang mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa kompetisi politik tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pemda. Berdasarkan ketidak-konsistenan hasil tersebut maka peneliti sekarang membuat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IRF) Pemda di Indonesia.

Ukuran Pemda

Susiyah dkk. (2018) mengatakan bahwa ukuran pemerintah dapat dilihat dari besar atau kecilnya total aset yang dimiliki pemerintah. Semakin besar suatu ukuran pemerintahan maka akan timbul rasa keingintahuan dari masyarakat terhadap aset pemerintah. Kemungkinan masyarakat beranggapan negative yang timbul terhadap kinerja pemerintah dapat diatasi dengan adanya transparansi atas laporan keuangan pemda. Sehingga untuk mengurangi anggapan tersebut pemerintah dapat melakukan publikasi laporan keuangan dengan memanfaatkan e- government karena merupakan media yang murah dan cepat. Pelaporan tersebut menggambarkan sifat transparansi dari pemerintah kepada masyarakat.

Hasil penelitian Susbiyani dkk. (2014) mengatakan bahwa ukuran kabupaten dan kota berpengaruh positif terhadap kepatuhan dengan pengungkapan wajib. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nosihana dan Yaya (2016) dan hasil penelitian Susiyah dkk. (2018) yang hasilnya mengatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (size) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di e-government.

Penelitian serupa mengenai ukuran pemerintah daerah juga dilakukan oleh Wau dan Ratmono (2015) diseluruh pulau jawa yang mana hasilnya mengatakan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan *Internet Financial Reporting* oleh pemerintah daerah. Beberapa penelitian lainnya yang hasilnya tidak signifikan yaitu penelitian (Rahman dkk, 2013), (Mutiha, 2017), dan (Verawaty, 2015). Ketidakkonsistenan hasil penelitian diatas mengakibatkan peneliti akan mengkaji ulang variabel ukuran pemerintah daerah (size) dengan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *Ukuran pemerintah daerah (size) berpengaruh positif terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IRF) Pemda di Indonesia.*

Rasio Pembiayaan Utang

Rasio pembiayaan utang atau leverage adalah kemampuan pemerintah dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimilikinya dalam memberikan program dan pelayanan untuk masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang (Nosihana & Yaya, 2016). Pengertian leverage juga dikatakan oleh Idris, Surasni, dan Irwan (2018) bahwa leverage adalah kemampuan pemerintah untuk memastikan dana pinjamannya dalam menyediakan layanan dan program bagi masyarakat sekarang dan di masa depan.

Leverage jika dilihat dari sisi pemerintah merupakan tambahan dana baru sehingga perkembangan daerah dapat dibantu untuk mewujudkan keinginan dari masyarakat. Hudoyo dan Mahmud (2014) mengatakan bahwa leverage yang dimiliki pemda jika memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada dana dari kreditur yang dianggap sebagai modal pembangunan daerah untuk mewujudkan Good Corporate Governance dalam pemerintahan sehingga menjadikan pemda dinilai lebih terbuka terhadap pelaporan keuangannya.

Rahman dkk, (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia telah meneliti bahwa rasio pembiayaan utang (leverage) berpengaruh positif terhadap pelaporan informasi keuangan di internet. Hal tersebut tidak sejalan dengan beberapa hasil penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh (Hudoyo & Mahmud, 2014), (Verawaty, 2015), (Nosihana & Yaya, 2016), (Idris dkk, 2018) yang mana hasil penelitiannya mengatakan bahwa rasio pembiayaan utang (leverage) tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan di internet. Ketidak konsistenan ini membuat peneliti akan melakukan penelitian ulang dengan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : *Rasio pembiayaan utang (leverage) berpengaruh positif terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IRF) Pemda di Indonesia.*

Pendapatan Perkapita

Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi pada suatu daerah akan meningkatkan kapasitas dari kebutuhan akan akuntabilitas pemerintah (Ingram, 1984). Menurut Styles and Tennyson (2007) dalam Wau dan Ratmono (2015) daerah yang masyarakatnya memiliki pendapatan tinggi akan mempunyai tingkat pengawasan politik yang tinggi oleh masyarakat dan otomatis akan meningkatkan permintaan mengenai informasi kinerja dari pemerintah.

Menurut Hudoyo dan Mahmud (2014) level perekonomian masyarakat disuatu daerah dapat mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat dan tingkat perekonomian juga mempengaruhi teknologi yang di dapatkan oleh masyarakat. Gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah atau wilayah tertentu bisa dilihat melalui pendapatan per kapita. Tingkat produktivitas masyarakat dapat menjadi gambaran sebagai ukuran pendapatan per kapita. Semakin tinggi dan besar dari pendapatan masyarakat di suatu daerah maka akan semakin tinggi kemampuan untuk dapat mengadopsi teknologi dalam usaha mendapatkan informasi.

Hudoyo dan Mahmud (2014) mengatakan bahwa pengungkapan informasi keuangan oleh pemda dipengaruhi oleh level ekonomi masyarakat daerah tersebut. Dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Oleh Pemerintah Daerah” hasilnya mengatakan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemda di Indonesia. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Wau dan Ratmono (2015) dan bertentangan atau tidak sejalan dengan beberpa hasil penelitian lainnya seperti Mutiha (2017), Diptyana dan Rokhmaniab (2018), dan Verawaty (2015). Berdasarkan ketikkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IRF) Pemda di Indonesia.

Kekayaan Daerah

Keberhasilan pemerintah daerah dalam kinerjanya dapat dilihat dari tingkat kekayaan daerah. Nosihana dan Yaya (2016) mengatakan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dapat mencerminkan kekayaan daerah. Sehingga pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan indikator kesuksesan pemerintah. Semakin sukses atau tinggi kekayaan yang dimiliki suatu daerah maka pemerintah akan menunjukkan informasi kinerja keuangan dan prestasinya melalui pengungkapan laporan keuangan menggunakan media e-government sehingga dapat meraih simpati dan dukungan masyarakat. Pengungkapan pelaporan ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas amanat yang telah diberikan sebagai bukti bahwa pemerintahan berjalan dengan baik.

Dalam penelitian Rahman dkk (2013) mengatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* pemda di e-government. Pada penelitian Junaedi (2015) juga berpengaruh positif, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka semakin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan keuangannya melalui internet. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Susiyah dkk. (2017) yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Website Pemda”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IRF) Pemda di Indonesia.

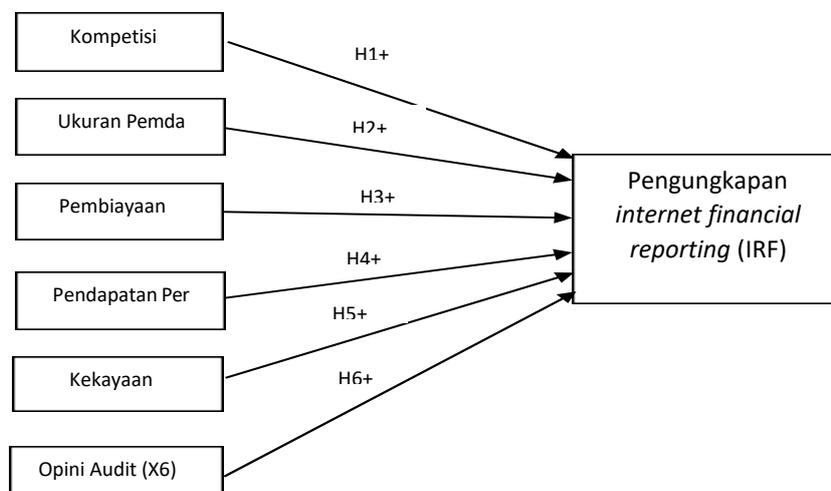
Opini Audit

Styles and Tennyson (2007) dalam Wau dan Ratmono (2015) pemerintah daerah yang telah mendapat penghargaan dari organisasi eksternal atas praktek pelaporan keuangannya cenderung akan menyajikan laporan keuangannya di internet. Opini audit dalam laporan keuangan terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Idris dkk (2018) mengatakan bahwa pendapat BPK yang baik tentang laporan keuangan pemerintah daerah akan mengarah pada kecenderungan yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah untuk menerapkan praktik pelaporan keuangan untuk menunjukkan kepada publik kemampuan dan komitmennya sesuai dengan SAP.

Kecenderungan melaporkan keuangan pemerintah setelah diaudit sejalan dengan teori keagenan yang artinya pemerintah yang telah mendapat mandat dari masyarakat untuk mempertanggung-jawabkan kinerja. Pelaporan keuangan yang sudah diaudit ini juga sejalan dengan teori *signalling* bahwa pemerintahan telah memberikan informasi yang baik kepada masyarakat.

Junaedi (2015) mengatakan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *Internet Financial Reporting* pemda. Sejalan dengan penelitian Wau dan Ratmono (2015) yang mengatakan opini audit berpengaruh signifikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan beberapa hasil penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016), dan Idris dkk, (2018) yang mana hasilnya menyebutkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Internet Financial Reporting* melalui e- government. Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

H₆ : *Opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan Internet Financial Reporting (IRF) Pemda di Indonesia.*



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan enam variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah: (1) Kompetisi politik, (2) Ukuran pemda, (3) Rasio pembiayaan utang, (4) Pendapatan perkapita, (5) Kekayaan daerah, (6) Opini Audit. Variabel dependennya adalah Pengungkapan *Internet Financial Reporting* pemda. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan apakah variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. Objek dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah daerah kota atau kabupaten di Indonesia. Pemerintah daerah di Indonesia berjumlah sebanyak 548, terdiri dari 34 provinsi, 416

kabupaten (1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta), dan terdapat 98 kota (5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta). Sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari pihak lain. Data tersebut didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ada di pusat informasi dan komunikasi, yaitu data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Indonesia tahun 2019. Proses pengumpulan data dilakukan melalui catatan berupa softcopy yang telah di download pada website resmi setiap pemerintah daerah, website Badan Pusat Statistik, dan website Kemendagri.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik random sampling dengan pengacakan menggunakan rumus $=\text{rand}(\text{min}:\text{max})$ pada microsoft excel. Metode ini dipilih untuk memberikan sampel yang mewakili populasi sebaik mungkin, karena setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel (Lind, Marchal, & Wathen, 2018). Pengambilan sampel juga diambil berjenjang dengan masing-masing provinsi 2 pemerintah daerah. Selain metode, terdapat kriteria yang berikutnya digunakan untuk memastikan informasi yang didapatkan dapat memenuhi kaidah statistik matematika. Berikut kriteria-kriteria yang digunakan pada penelitian ini : (1) Bukan pemerintah daerah yang pemekaran (minimal 3 tahun terakhir) dan kabupaten/kota administratif. (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai website dan dapat diakses menggunakan domain do.go.id guna perolehan data penelitian. (3) Pemerintah daerah yang mempublikasikan informasi terkait laporan keuangan pada website mereka.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan bantuan software komputer yaitu SPSS. Analisis statistik deskriptif dapat memberikan informasi deskriptif dari perhitungan nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, dan nilai rata-rata (mean). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perilaku dan distribusi suatu data sampel. Selanjutnya uji asumsi klasik, dilakukan dengan empat pengujian yaitu (1) Uji mulikolinearitas, ditujukan untuk menguji apakah antarvariabel independen dalam model regresi terdapat kolerasi (Ghozali, 2011). (2) Uji autokolerasi ditujukan untuk menguji apakah ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t1 (sebelumnya) dalam model regresi linear, yang biasanya terjadi pada data time series. (3) Uji hetokedastisitas ditujukan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. (4) Uji normalitas ini ditujukan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal. Sedangkan untuk pengujian analisis data menggunakan pengujian regresi linier berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan data pada penelitian berjumlah 66 sampel dari 514 kabupaten/kota di Indonesia sebagai populasi. Metode random yang digunakan memberikan sampel yang memungkinkan setiap elemen populasi untuk terpilih (Lind dkk. 2018). Hal ini menghasilkan data yang beragam sehingga mewakili populasi yang sebenarnya. Sampel yang dikumpulkan meliputi seluruh provinsi di Indonesia dengan kriteria sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Kompetisi Politik	0,996	1,004	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Ukuran Pemda	0,770	1,298	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Rasio Pembiayaan Utang	0,935	1,069	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Pendapatan perkapita	0,805	1,243	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kekayaan Daerah	0,641	1,560	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Opini Audit	0,927	1,079	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data sekunder diolah, 2020

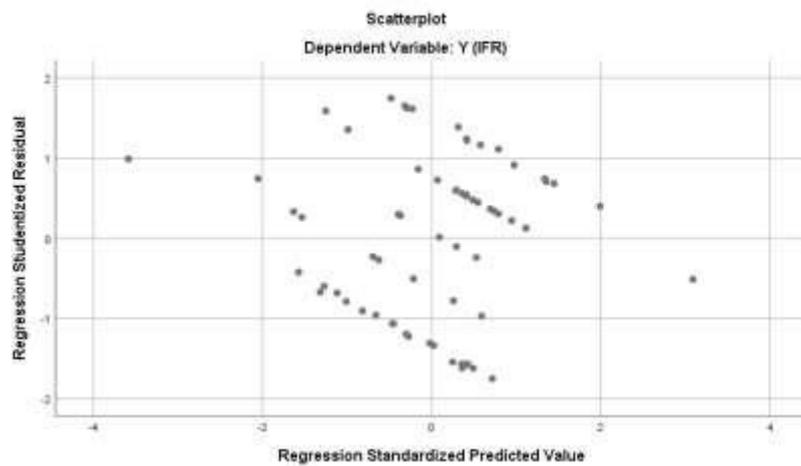
Tabel 1 menunjukkan hasil uji multikolinearitas dimana ditunjukkan adanya nilai yang cukup signifikan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji pertama, interpretasi hasil dari nilai tolerance seluruh variabel independen lebih dari 0,10 sehingga tidak memiliki masalah multikolinearitas. Uji kedua adalah nilai VIF yang kurang dari 10 , dimana table 1 menunjukkan seluruh variabel independen miliki nilai kurang dari 10. Hal ini menegaskan kembali bahwa data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.511 ^a	.261	.186	1.465	1.079

- a. Predictors: (Constant), X6 (OP), X1 (POLCOMP), X3 (LEV), X2 (SIZE), X4 (PDRB), X5 (WEALTH)
- b. Dependent Variable: Y (IFR)

Table DW menunjukkan dengan jumlah 6 variabel independen dan 66 sampel, maka nilai dL dan dU adalah 1,251 - 1,642. Sehingga nilai DW pada model summary tidak lebih dari batas maksimum dU 1,642. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data pada estimasi model regresi tidak memiliki masalah atau resiko autokorelasi.



Gambar 2 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatter Plot

Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar diatas dengan metode Scatterplot menunjukkan persebaran titik koordinat sebagai berikut:

1. Titik-titik koodrinat merata di sekitar sumbu 0 (nol) diatas dan dibawah.
2. Titik-titik koordinat tidak berkumpul di bagian atas atau bawah saja sumbu o (nol).
3. Selain itu titik-titik koordinat tidak membentuk pola gelombang melebar, menyempi, kemudian melebar kembali.
4. Terakhir, titik-titik koordinat data tidak berpola atau terjadi acak alamiah.

Dari ciri tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa data estimasi model regresi tidak mengalami masalah atau resiko heteroskedastisitas.

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

Kolmogorovsmirnov	Nilai Sig.	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,200	Berdistribusi Normal

Sumber: Output SPSS 2020

Hasil uji normalitas data menunjukkan persebaran data yang normal, tidak terlalu tinggi menggunung atau landai. Hal ini tampak pada hasil uji normalitas dengan metode Kolmorov-Smirnov (Tabel 3) yang diterapkan pada unstandarize residual dengan nilai signifikansi 0,200 (Lind dkk. 2018).

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients β	Sig. t
(Constant)	12,992	0,008
Polcomp	1,384	0,235
Ln_Size	0,745	0,042
Lev	-23,381	0,002
Ln_PDRB	-0,539	0,056
Wealth	8,513	0,189
Ln_OP	-1,436	0,097

Sumber: Output SPSS 2020

Berdasarkan hasil output output analisis regresi berganda pada tabel 4 maka bentuk dari persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 12,992 + 1,384POLCOMP + 0,745LN_SIZE - 23,381LEV - 0,539PDRB + 8,513WEALTH - 1,436OP + e$$

Tabel 5 Hasil Uji Nilai F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	47,851	6	7,975	3,807	0,003
Residual	123,603	59	2,095		
Total	171,455	65			

Sumber: Data yang diolah, 2020

Pada Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetisi Politik (POLCOM), Ukuran Pemda (LN_SIZE), Rasio Pembiayaan Utang (LEVERAGE), Pendapatan Per Kapita (LN_PDRB), Kekayaan Daerah (WEALTH), Opini Audit (LN_OP) dapat menjelaskan variabel Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda (IFR).

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa Kompetisi Politik (polcomp) memiliki nilai koefisien 1,384 (positif) dengan nilai sig sebesar 0,235 > alpha 0,05. Nilai tersebut membuktikan H1 tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetisi Politik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) yang menyatakan bahwa Kompetisi Politik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda (IFR).

Berdasarkan tabel 4, nilai koefisien Ukuran Pemda 0,745 terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda dengan nilai sig 0,042 < alpha 0,05. Nilai tersebut membuktikan H2 terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemda berpengaruh positif terhadap variabel dependen pengungkapan IFR. Ukuran dari pemerintah dapat menunjukkan seberapa besar suatu pemerintahan. Sehingga ukuran pemda memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *Internet Financial Reporting* pemda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Nosihana dan Yaya (2016) dan Susiyah dkk. (2018) yang menyebutkan bahwa besaran ukuran pemda akan mendorong kinerja pengungkapan IFR semaik baik.

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa Rasio Pembiayaan Utang (leverage) memiliki nilai koefisien -23,381 (negatif) dengan nilai sig 0,02 < alpha 0,05. Nilai tersebut membuktikan H3 tidak terdukung yang berarti bahwa Rasio Pembiayaan Utang berpengaruh negatif terhadap pengungkapan IFR. Leverage yang diperoleh dari rasio pembiayaan utang pemda menunjukkan

angka rasio yang relatif kecil. Hal ini dipengaruhi oleh factor diluar leverage, bahwa leverage yang tinggi adalah proporsi utang terhadap modal semakin tinggi, sehingga menurunkan kapasitas atau ukuran pemda. Hal ini menandakan bahwa semakin rendah rasio utang terhadap modal kinerja pengungkapan IFR maka akan semakin baik. Hasil hipotesis 3 pada penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rahman, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa rasio pembiayaan utang memiliki pengaruh positif.

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa Pendapatan Per Kapita memiliki nilai koefisien -539 (negatif) dengan nilai sig 0,56 > alpha 0,05. Koefisien pendapatan perkapita negative dan nilai sig lebih besar dari alpha, sehingga H4 tidak terdukung. Hubungan variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR. Asumsi masyarakat berpendapatan tinggi lebih termotivasi mengakses laporan keuangan, adalah asumsi yang tidak sepenuhnya benar. Fakta tentang pendapatan masyarakat yang meningkat adalah fenomena ekonomi yang terpisah dari kinerja keuangan pemda. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wau dan Ratmono (2015) yang menyatakan bahwa Pendapatan Per Kapita memiliki pengaruh positif.

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa Kekayaan Daerah (wealth) memiliki nilai koefisien 8,513 (positif) dengan nilai sig sebesar 0,189 > alpha 0,05. Nilai tersebut membuktikan bahwa H5 tidak terdukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kompetisi Politik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR. Kekayaan daerah yang semakin tinggi memberikan peluang pemda untuk menambah aset dan meningkatkan kinerja operasional seperti pengembangan jaringan dan piranti elektronik website dan sebagainya, sehingga pengungkapan IFR menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junaedi (2015) dan Susiyah dkk. (2018) yang menyatakan bahwa Kekayaan Daerah memiliki pengaruh positif.

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa Opini Audit memiliki nilai koefisien -1436 (negatif) dengan nilai sig 0,97 > alpha 0,05. Koefisien opini audit negative dan nilai sig lebih besar dari alpha berarti H6 tidak terdukung, sehingga hubungan variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan IFR. Nilai negative pada koefisien opini audit ini disebabkan karena tidak liniernya hubungan antara pengungkapan IFR dengan opini audit. Banyak pemda yang memiliki opini audit WTP bahkan tidak memiliki akses website yang cukup memadai. Selain itu, pelaporan yang mudah diakses juga terjadi sekalipun memiliki website, misalnya beberapa pemda yang mengedepankan promosi wilayah pariwisata dan potensi investasi daripada pengungkapan dan transparansi laporan keuangan daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Junaedi (2015) dan Wau dan Ratmono (2015) yang menyatakan bahwa Opini Audit memiliki pengaruh positif.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Model	Adjusted R Square
1	0,206

Sumber : Output SPSS 2020

Tabel 6 menunjukkan nilai adjusted R square yaitu sebesar 0,206. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetisi Politik (polcomp), Ukuran Pemda (size), Rasio Pembiayaan Utang (leverage), Pendapatan Per Kapita (PDRB), Kekayaan Daerah (wealth) dan Opini Audit (OP) dapat menjelaskan variabel Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda (IFR) hanya sebesar 20.6%. Sisanya sebesar 79.4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan pemodelan estimasi model regresi liner berganda, disimpulkan bahwa: (1) Kompetisi Politik tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda. Hal ini maksudnya

bahwa proksi kompetisi politik yang dikukur dengan jumlah anggota dewan partai non pendukung kepala daerah dibagi dengan jumlah total anggota dewan tidak mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting* pemda. (2) Ukuran Pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda. Ukuran pemda dapat dilihat dari seberapa besar aset daerah yang dimiliki. Aset besar yang dimiliki pemda dapat memicu kecurigaan masyarakat, sehingga terjadi pengawasan agar tidak ada penyelewengan dana. (3) Rasio Pembiayaan Utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda. Hal ini menandakan bahwa semakin rendah rasio utang pemda maka pengungkapan *Internet Financial Reporting* akan semakin baik. (4) Pendapatan Per Kapita tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda. Artinya bahwa hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tidak mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting* pemda. (5) Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda. Artinya yaitu bahwa besar-kecil hasil proporsi total pendapatan asli daerah dibagi total jumlah penduduk tidak mempengaruhi pengungkapan *Internet Financial Reporting* pemda. (6) Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Internet Financial Reporting* Pemda. Hal ini menandakan bahwa opini audit WTP pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah melakukan pengungkapan *Internet Financial Reporting* pemda.

Penelitian ini memberikan gambaran parsial dan simultan model mempengaruhi variabel dependen. Maka kedepan, penelitian sejenis perlu dikembangkan untuk memberikan khasanah keilmuan yang lebih sempurna dan komprehensif. Penelitian tersebut harus mengakomodir factor-faktor yang diduga lebih berpengaruh dan sampel yang lebih baik.

Pada aspek praktik, pemerintah sebagai pemangku kebijakan dapat menjadikan penelitian ini sebagai rujukan dalam mendorong kinerja pengungkapan IFR. Karena pengungkapan IFR menjadi factor penting yang dapat mendorong upaya pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat memperhatikan variabel independen yang berpengaruh positif untuk diupayakan. Sedangkan variabel dengan pengaruh negative agar dapat ditinjau ulang dan disolusikan adar berdampak positif terhadap kinerja pengungkapan IFR.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi *Internet Financial Reporting* pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 100-109.
- Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58.
- Diptyana, P., & Rokhmania, N. (2018). Exploring government *Internet Financial Reporting* in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 115-138. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.1039>
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Hudoyo, Y., & Mahmud, A. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457-465. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4210>
- Idris, A. L. M., Surasni, N. K., & Irwan, M. (2018). The determinant disclosure of *Internet Financial Reporting* in district and city government in Indonesia. *International Journal of Economics and Research*, 9(1), 62-74. Diakses dari [https://www.ijeronline.com/documents/volumes/2018/Jan%20-%20Feb%2018/ijer%20v9i1%20jf\(6\).pdf](https://www.ijeronline.com/documents/volumes/2018/Jan%20-%20Feb%2018/ijer%20v9i1%20jf(6).pdf)
- Ingram, R. W. (1984). Economic incentives and the choice of state government accounting practices. *Journal of Accounting Research*, 22(1), 126-144. <https://doi.org/10.2307/2490704>
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.

- Junaedi, J. (2015). Pengaruh kekayaan pemerintah daerah, ketergantungan daerah, kompleksitas, tipe pemerintah daerah, kualitas audit dan tingkat penyimpangan anggaran terhadap pengungkapan internet-based financial reporting. *Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta*, 2(4), 42 - 54. Diakses dari <http://sainstech.poltekindonusa.ac.id/index.php/view/article/view/76>
- Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. 2018. *Statistical techniques in business & economics*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Mutiha, A. H. (2017). Faktor penentu aksesibilitas *Internet Financial Reporting* pada *e-government* pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat. *Simposium Nasional Akuntansi Bandung Universitas Widyatama*, 550-560. Diakses dari <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/8563>
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). *Internet Financial Reporting* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 89-104.
- Putera, R. E. (2016). Pengelolaan keuangan daerah yang transparan di Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. *Sosiohumaniora*, 18(3), 261-269. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.6075>
- Susbiyani, A., Subroto, B., & Purnomosidhi, B. (2014). The compliance with mandatory disclosure of financial statement: A study from local government in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(10), 124-131. Diakses dari <https://www.iiste.org/Journals/index.php/RJFA/article/view/13064>
- Susiyah, H. Y., Afifudin, A., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di website pemda. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. Diakses dari <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/322>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Van Slyke, D. M. (2006). Agents or stewards: Using theory to understand the government-nonprofit social service contracting relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(2), 157-187. <https://doi.org/10.1093/jopart/nul012>
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *E-government* Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Wau, I., & Ratmono, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan Internet Financial. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 187 - 198. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9573>